



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[] [] [] []

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 217);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau nomor 237);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2020 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau.



Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana;
- d. pengelolaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi

BAB II RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengalokasian alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak masing-masing desa di tahun 2019.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$\text{DBHPRD} = \text{AD} + \text{AF}$$

$$\text{AD} = \frac{\text{JDBHPRD} \times 60\%}{D}$$

$$\text{AF} = \text{RRPD} \times \text{JAF}$$

$$\text{RRPD} = (\text{RPD}/\text{TRPD} Z1) \times 100\%$$

Keterangan :

DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa

RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa

JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)

RPD = Realisasi Pajak Desa

TRPD = Total Realisasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau

D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.



- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (3) Penetapan alokasi Defenitif dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah ditetapkan setelah hasil audit terhadap APBD Kabupaten Lamandau tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa :
- a. Rekomendasi Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. Surat keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019.
- (5) Sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d bahwa terdapat Desa tidak lunas SPPT PBB Tahun 2019, Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2019 kepada BKD.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2019 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.

BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2020 digunakan untuk :

- a. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kegiatan di bidang pembangunan, Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan Kegiatan di bidang pembinaan masyarakat ;
- b. Operasional pemerintah Desa dalam rangka pendampingan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi terhadap laporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Lamandau.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Bupati (District Head) of Lamandau, is placed here. The signature is fluid and cursive, appearing to read "Bupati Lamandau".

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 2 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 641

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Batang Kawa	Jamuat	16.601.792	4.292.823	0,001999	940.768.238	1.880.368
2	Batang Kawa	Ginih	16.601.792	1.543.082	0,000718	940.768.238	675.910
3	Batang Kawa	Benakitan	16.601.792	5.819.934	0,002710	940.768.238	2.549.282
4	Batang Kawa	Kina	16.601.792	2.283.685	0,001063	940.768.238	1.000.313
5	Batang Kawa	Karang Mas	16.601.792	-	-	940.768.238	-
6	Batang Kawa	Kinipan	16.601.792	5.662.956	0,002637	940.768.238	2.480.522
7	Batang Kawa	Liku	16.601.792	1.036.207	0,000482	940.768.238	453.886
8	Batang Kawa	Batu Tambun	16.601.792	1.690.000	0,000787	940.768.238	740.264
9	Batang Kawa	Mengkalang	16.601.792	4.591.001	0,002138	940.768.238	2.010.978
10	Belantikan Raya	Karang Besi	16.601.792	-	-	940.768.238	-
11	Belantikan Raya	Sungai Buluh	16.601.792	49.639.808	0,023113	940.768.238	21.743.527
12	Belantikan Raya	Belibi	16.601.792	16.625.343	0,007741	940.768.238	7.282.333
13	Belantikan Raya	Bayat	16.601.792	52.992.318	0,024673	940.768.238	23.212.014
14	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	16.601.792	1.893.042	0,000881	940.768.238	829.202
15	Belantikan Raya	Nanga Matu	16.601.792	1.892.345	0,000881	940.768.238	828.896
16	Belantikan Raya	Tangga Batu	16.601.792	16.294.414	0,007587	940.768.238	7.137.377
17	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	16.601.792	15.351.117	0,007148	940.768.238	6.724.189
18	Belantikan Raya	Benuutan	16.601.792	1.227.449	0,000572	940.768.238	537.655
	Belantikan Raya	Petarikan	16.601.792	1.486.695	0,000692	940.768.238	651.211
							17.253.003



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak			Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa			
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)
20	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	16.601.792	49.401.764	0,023002	940.768.238	21.639.258	38.241.050			
21	Belantikan Raya	Kahingai	16.601.792	3.519.168	0,001639	940.768.238	1.541.487	18.143.279			
22	Bulik	Tamiang	16.601.792	75.219.233	0,035022	940.768.238	32.947.981	49.549.773			
23	Bulik	Nanga Pamalonitian	16.601.792	9.194.307	0,004281	940.768.238	4.027.346	20.629.138			
24	Bulik	Sungai Mentawa	16.601.792	22.953.932	0,010687	940.768.238	10.054.419	26.656.211			
25	Bulik	Arga Mulya	16.601.792	52.037.119	0,024229	940.768.238	22.793.612	39.395.404			
26	Bulik	Perigi Raya	16.601.792	26.355.245	0,012271	940.768.238	11.544.283	28.146.075			
27	Bulik	Kujan	16.601.792	178.741.917	0,083223	940.768.238	78.293.609	94.895.401			
28	Bulik	Bukit Indah	16.601.792	42.953.638	0,019999	940.768.238	18.814.811	35.416.603			
29	Bulik	Guci	16.601.792	33.890.775	0,015780	940.768.238	14.845.041	31.446.833			
30	Bulik	Batu Kotam	16.601.792	54.663.894	0,025452	940.768.238	23.944.207	40.545.999			
31	Bulik	Bumi Agung	16.601.792	52.517.233	0,024452	940.768.238	23.003.914	39.605.706			
32	Bulik	Beruta	16.601.792	25.442.504	0,011846	940.768.238	11.144.479	27.746.271			
33	Bulik	Bunut	16.601.792	20.908.226	0,009735	940.768.238	9.158.347	25.760.139			
34	Bulik	Sumber Mulya	16.601.792	26.381.620	0,012283	940.768.238	11.555.836	28.157.628			
35	Bulik Timur	Nanga Kemujan	16.601.792	1.505.125	0,000701	940.768.238	659.284	17.261.076			
36	Bulik Timur	Toka	16.601.792	12.160.000	0,005662	940.768.238	5.326.396	21.928.188			
37	Bulik Timur	Merambang	16.601.792	6.622.661	0,003084	940.768.238	2.900.898	19.502.690			
38	Bulik Timur	Sungkup	16.601.792	17.614.341	0,008201	940.768.238	7.715.540	24.317.332			
39	Bulik Timur	Nanga Palikodan	16.601.792	8.957.500	0,004171	940.768.238	3.923.618	20.525.410			
40	Bulik Timur	Nuangan	16.601.792	30.922.332	0,014398	940.768.238	13.544.786	30.146.578			
41	Bulik Timur	Nanga Koring	16.601.792	11.136.394	0,005185	940.768.238	4.878.030	21.479.822			
42	Bulik Timur	Suka Maju	16.601.792	26.312.645	0,012251	940.768.238	11.525.623	28.127.415			
43	Bulik Timur	Sepondam	16.601.792	4.979.039	0,002318	940.768.238	2.180.949	18.782.741			
44	Bulik Timur	Pedongatan	16.601.792	90.779.500	0,042267	940.768.238	39.763.782	56.365.574			
45	Bulik Timur	Batu Tunggal	16.601.792	6.646.542	0,003095	940.768.238	2.911.358	19.513.150			
46	Bulik Timur	Bukit Jaya	16.601.792	24.667.528	0,011485	940.768.238	10.805.019	27.406.811			
47	Delang	Riam Tinggi	16.601.792	2.170.978	0,001011	940.768.238	950.945	17.552.737			

A -

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak			Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa		
				Realisasasi Pajak		Alokasi Formula				
				(5)	(6)	(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)		
48	Delang	Riam Panahan	16.601.792	4.678.878	0,002179	940.768.238	2.049.470	18.651.262		
49	Delang	Sekombulan	16.601.792	5.035.433	0,002345	940.768.238	2.205.651	18.807.443		
50	Delang	Kubung	16.601.792	1.921.173	0,000895	940.768.238	841.524	17.443.316		
51	Delang	Landau Kantu	16.601.792	2.116.750	0,000986	940.768.238	927.192	17.528.984		
52	Delang	Penyombaan	16.601.792	5.452.000	0,002538	940.768.238	2.388.118	18.989.910		
53	Delang	Lopus	16.601.792	4.586.197	0,002135	940.768.238	2.008.874	18.610.666		
54	Delang	Hulu Jojabo	16.601.792	7.042.616	0,003279	940.768.238	3.084.849	19.686.641		
55	Delang	Nyalang	16.601.792	8.286.493	0,003858	940.768.238	3.629.699	20.231.491		
56	Delang	Sepoyu	16.601.792	6.774.165	0,003154	940.768.238	2.967.260	19.569.052		
57	Lamandau	Sekoban	16.601.792	8.519.620	0,003967	940.768.238	3.731.815	20.333.607		
58	Lamandau	Tanjung Beringin	16.601.792	5.551.466	0,002585	940.768.238	2.431.687	19.033.479		
59	Lamandau	Samu Jaya	16.601.792	10.206.597	0,004752	940.768.238	4.470.755	21.072.547		
60	Lamandau	Cuhai	16.601.792	4.199.808	0,001955	940.768.238	1.839.625	18.441.417		
61	Lamandau	Suja	16.601.792	24.444.595	0,011382	940.768.238	10.707.368	27.309.160		
62	Lamandau	Penopa	16.601.792	14.472.448	0,006738	940.768.238	6.339.309	22.941.101		
63	Lamandau	Kawa	16.601.792	17.961.145	0,008363	940.768.238	7.867.449	24.469.241		
64	Lamandau	Karang Taba	16.601.792	20.000	0,000009	940.768.238	8.761	16.610.553		
65	Lamandau	Sungai Tuat	16.601.792	9.947.167	0,004631	940.768.238	4.357.118	20.958.910		
66	Lamandau	Bakonsu	16.601.792	60.858.570	0,028336	940.768.238	26.657.637	43.259.429		
67	Menthobi Raya	Bukit Harum	16.601.792	80.617.750	0,037536	940.768.238	35.312.671	51.914.463		
68	Menthobi Raya	Bukit Makmur	16.601.792	101.001.902	0,047027	940.768.238	44.241.460	60.843.252		
69	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	16.601.792	2.377.440	0,001107	940.768.238	1.041.381	17.643.173		
70	Menthobi Raya	Sumber Jaya	16.601.792	5.789.566	0,002696	940.768.238	2.535.981	19.137.773		
71	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	16.601.792	59.974.669	0,027924	940.768.238	26.270.465	42.872.257		
72	Menthobi Raya	Batu Ampar	16.601.792	46.359.421	0,021585	940.768.238	20.306.632	36.908.424		
73	Menthobi Raya	Bukit Raya	16.601.792	1.219.013	0,000568	940.768.238	533.959	17.135.751		
74	Menthobi Raya	Topalan	16.601.792	1.360.500	0,000633	940.768.238	595.934	17.197.726		
75	Menthobi Raya	Nanuah	16.601.792	21.000.000	0,009778	940.768.238	9.198.546	25.800.338		


 ✓
 A1

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak			Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				(3)	(4)	(5)		
(1)	(2)			Raisosasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			(9) = (4) + (8)
76	Menthobi Raya	Melata	16.601.792	33.323.370	0,015516	940.768.238	14.596.503	31.198.295
77	Menthobi Raya	Modang Mas	16.601.792	57.020.394	0,026549	940.768.238	24.976.416	41.578.208
78	Sematu Jaya	Batu Hambawang	16.601.792	14.700.561	0,006845	940.768.238	6.439.228	23.041.020
79	Sematu Jaya	Purwareja	16.601.792	105.666.170	0,049199	940.768.238	46.284.531	62.886.323
80	Sematu Jaya	Bina Bhakti	16.601.792	35.784.009	0,016661	940.768.238	15.674.327	32.276.119
81	Sematu Jaya	Rimba Jaya	16.601.792	22.045.908	0,010265	940.768.238	9.656.681	26.258.473
82	Sematu Jaya	Mekar Mulya	16.601.792	71.436.624	0,033261	940.768.238	31.291.099	47.892.891
83	Sematu Jaya	Jangkar Prima	16.601.792	41.525.624	0,019335	940.768.238	18.189.303	34.791.095
84	Sematu Jaya	Wonorejo	16.601.792	54.917.070	0,025570	940.768.238	24.055.105	40.656.897
85	Sematu Jaya	Tri Tunggal	16.601.792	86.572.650	0,040309	940.768.238	37.921.106	54.522.898
Total			1.411.152.320	2.147.745.141	1,000000		940.768.274	2.351.920.594

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA